

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa dikenal sebagai UMKM, merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian di Indonesia. Sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang lebih merata. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tiga kategori UMKM yang diklasifikasikan berdasarkan aset dan omzet tahunan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021.

UMKM tersebar di berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Namun, setiap sektor mempunyai tantangan yang berbeda, seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya inovasi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat membatasi potensi pertumbuhannya. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian lokal di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu pusat inovasi UMKM di Indonesia karena budaya dan kreativitasnya, yang tercermin dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. UMKM yang berada di Kota Bandung meliputi berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, kerajinan tangan, *fashion*, jasa, serta banyak sektor lainnya. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dari tahun 2021 hingga 2024 jumlah UMKM di Kota Bandung dengan berbagai bidang usaha sebanyak 4.502 (Diskopukm, 2024).

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Bandung Tahun 2021-2024

No	Bidang Usaha	Tahun				Jumlah UMKM
		2021	2022	2023	2024	
1	Kuliner	831	355	558	670	2.414
2	<i>Fashion</i>	262	131	163	154	592

3	Jasa	121	53	67	56	297
4	Handicraft	71	40	64	53	228
5	Perdagangan	482	98	90	73	743
6	Lainnya	83	45	69	31	228
Total						4.502

Sumber: Diskopukm (2024)

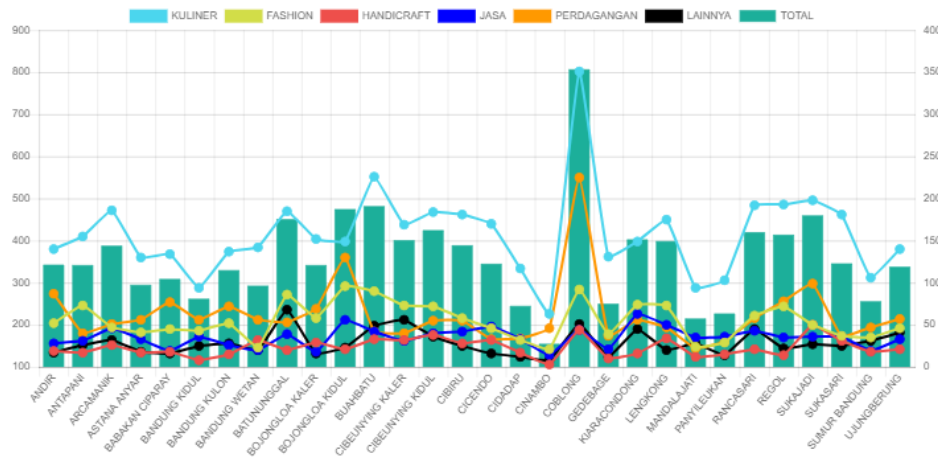
Pada data tersebut menunjukkan distribusi UMKM di Kota Bandung yang tersebar di berbagai bidang usaha, seperti kuliner, *fashion*, jasa, *handicraft*, perdagangan, dan lainnya dengan total keseluruhan mencapai 4.502 unit. Dari jumlah tersebut, bidang usaha kuliner merupakan yang paling diminati sebanyak 2.414 unit. Bidang ini mencakup berbagai jenis bisnis seperti kafe, restoran, dan makanan jalanan yang mencerminkan kreativitas dan inovasi para pelaku usaha. Tingginya minat masyarakat dalam menjalankan usaha di sektor kuliner mencerminkan tingginya tingkat persaingan di sektor ini. Kondisi tersebut, mendorong para pelaku UMKM kuliner di Kota Bandung untuk terus berinovasi dan menghadirkan kreativitas dalam usahanya agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat.

1.1.2 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan sektor koperasi serta UMKM di wilayah Kota Bandung. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung sebelumnya bernama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007. Namun, pada tahun 2016 kedua dinas ini dipisah sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 (Diskopukm, 2024)

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung aktif dalam menyediakan pelatihan kewirausahaan, pendampingan, hingga memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha. Berdasarkan data terbaru yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM terdapat sebanyak 10.690 UMKM yang

tersebar di 30 Kecamatan Kota Bandung dengan mencakup berbagai sektor, seperti kuliner, jasa, *fashion*, dan lainnya. Banyaknya UMKM di Kota Bandung ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran.



Gambar 1.1 Data UMKM Berdasarkan Wilayah di Kota Bandung

Sumber: Website Sirkuit Diskopukm Kota Bandung (2024)

Pada Gambar 1.1 terdapat grafik sebaran jumlah UMKM berdasarkan bidang usaha di 30 kecamatan Kota Bandung. Kecamatan Coblong mencatat jumlah UMKM terbanyak, yaitu 807 unit dengan mayoritas usahanya bergerak di sektor kuliner, yang menjadi salah satu daya tarik utama di wilayah tersebut. Beberapa daerah terkenal di Kecamatan Coblong dengan beragam kulinernya yaitu Jalan Dago, Jalan Dipati Ukur, dan Jalan Cihampelas, yang dipenuhi dengan kafe, restoran, serta jajanan khas yang menarik minat masyarakat dan wisatawan. Lalu, terdapat kecamatan Buahbatu yang menempati posisi kedua dengan total 482 unit dan diikuti dengan kecamatan Sukajadi yang menempati posisi ketiga sebanyak 480 unit (Diskopukm, 2024).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tercatat bahwa jumlah UMKM di

Indonesia mencapai 66 juta dan berkontribusi sebanyak 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, setara Rp9.580 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah total nilai ekonomi Indonesia berasal dari sektor UMKM. Dengan kontribusi yang besar ini, UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%

Sumber: Kadin Indonesia (2024)

Akan tetapi, perkembangan UMKM di Indonesia tidak selalu stabil. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah UMKM mengalami penurunan sebesar -2,24% akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha terpaksa tutup. Namun, pada tahun 2021 jumlah UMKM kembali bangkit dengan pertumbuhan positif sebesar 2,28%. Pada tahun 2022, pertumbuhannya sedikit menurun sebesar -0,70%, tetapi pada tahun 2023 jumlah UMKM kembali meningkat sebesar 1,52%, menunjukkan pemulihan yang kembali stabil (Kadin Indonesia, 2024).

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan hasil dari survei Asian Development Bank menunjukkan bahwa sebanyak 48,65% dari total UMKM di Indonesia telah menutup usahanya atau bangkrut (Suheriadi, 2020). Keadaan ini menggambarkan betapa rentannya UMKM terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi dan situasi yang tidak menentu. Banyak pelaku UMKM yang memulai usaha tanpa persiapan yang matang, sering kali dipengaruhi oleh keadaan, seperti kesulitan mencari pekerjaan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan, banyak UMKM yang mudah mengalami kebangkrutan, namun kembali berusaha melanjutkan usahanya tanpa memiliki perencanaan yang jelas. Padahal, seharusnya UMKM dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu faktor terjadinya permasalahan ini adalah kurangnya persiapan dalam membuat perencanaan

keuangan pribadi yang tepat dari para pelaku usaha untuk keberlangsungan usaha di masa depan.

Sebelum dapat mengelola keuangan dengan baik, pelaku UMKM perlu terlebih dahulu memahami dalam membuat perencanaan keuangan pribadi yang tepat. Perencanaan keuangan yaitu proses menyusun strategi pengelolaan keuangan secara terstruktur guna mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal dan mengurangi risiko yang kemungkinan dapat terjadi (Yudianto, 2023).

Tabel 1.3 Tingkat Kesehatan Finansial UMKM di Indonesia

Aspek	Skor
Pengelolaan Keuangan	56,9
Pendanaan	47,2
Perencanaan Keuangan	27,2

Sumber: Info Bank News (2023)

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Bank OCBC bersama NielsenIQ, Inggit Primadevi, *Director Consumer Insights* NielsenIQ Indonesia, mengungkapkan bahwa pada tingkat kesehatan finansial UMKM di Indonesia, aspek perencanaan keuangan menempati level terendah dengan skor 27,2. Sementara itu, pada aspek pengelolaan keuangan memperoleh skor 56,9 dan pada aspek pendanaan memperoleh skor 47,2 (Pratama, 2023). Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan, tetapi dalam melakukan perencanaan untuk jangka panjang masih kurang diperhatikan. Fenomena yang terjadi ini menggambarkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memahami atau mengutamakan pentingnya perencanaan keuangan untuk jangka panjang.

Melaksanakan suatu kegiatan tanpa adanya perencanaan, akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan selama proses berlangsung. Dengan adanya perencanaan keuangan yang baik, seseorang dapat mencapai kebebasan finansial, meraih berbagai tujuan hidup, dan terhindar dari masalah keuangan yang disebabkan oleh utang (OJK, 2019). Namun, pelaku UMKM seringkali melakukan kesalahan dalam merencanakan keuangan, seperti mencampurkan

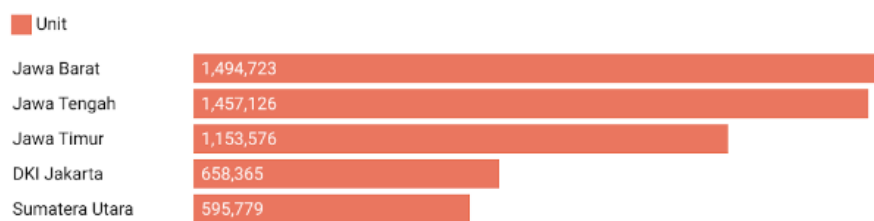
keuangan pribadi dengan keuangan usaha, tidak memberikan gaji untuk diri sendiri, tidak memiliki laporan keuangan, serta mengabaikan evaluasi terhadap laporan keuangan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang mengambil keputusan dalam keuangan berdasarkan perkiraan saja, tanpa didukung data yang akurat. Hal ini membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kerugian yang dihasilkan, sehingga usahanya bisa tidak berkembang atau bahkan merugi (Nony Kezia Marchyta, 2023).

Pentingnya mempunyai pencatatan yang akurat, seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca, agar pemilik usaha lebih mudah dalam mengawasi kinerja bisnisnya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh literasi dan perencanaan keuangan yang tepat, diharapkan taraf hidup masyarakat dapat menjadi meningkat (Yushita, 2017). Pengelolaan keuangan yang baik juga sangat penting untuk meningkatkan keberlangsungan UMKM di berbagai daerah, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.

Menurut grafik berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM mengenai persebaran jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat mendominasi sebanyak 1,49 juta unit, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 1,45 juta unit dan Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat utama bagi UMKM di Indonesia, sementara distribusi di luar Pulau Jawa tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti infrastruktur yang terbatas, proses perizinan yang rumit, kekurangan tenaga kerja yang terampil, dan masalah geografis yang beragam di seluruh Indonesia.

Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

*Berdasarkan Provinsi



Gambar 1.2 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Kemenkop UKM (2022)

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat pertumbuhan UMKM tercepat. Kota ini terkenal sebagai pusat berbagai kegiatan perekonomian, dengan UMKM yang tersebar di berbagai sektor, antara lain kuliner, jasa, pakaian, dan kerajinan tangan. Banyak usaha kecil yang menjadikan Kota Bandung sebagai rumah yang diikuti oleh semangat kewirausahaan, inovasi, dan kreativitas bagi pelaku usahanya. Keberadaan komunitas usaha yang aktif dan dukungan pemerintah daerah melalui beberapa program pengembangan UMKM turut mempercepat ekspansi UMKM di kota ini. Selain itu, keunggulan lokasi Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata menjadi faktor pendorong terhadap meningkatnya permintaan barang dan jasa.

Tabel 1.4 Jumlah UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023

No	Nama Kota	Jumlah UMKM
1	Kota Bandung	523.584
2	Kota Bekasi	309.116
3	Kota Depok	247.207
4	Kota Tasikmalaya	138.703
5	Kota Bogor	131.538

Sumber: Open Data Jawa Barat (2023)

Berdasarkan data Tabel 1.4, terdapat lima kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2023 menurut Open Data Jawa Barat. Kota Bandung menduduki peringkat pertama dengan jumlah UMKM terbanyak, yaitu 523.584 unit usaha. Posisi kedua ditempati oleh Kota Bekasi dengan 309.116 unit, sementara Kota Depok berada di peringkat ketiga dengan total 247.207 unit usaha. Dari data tersebut menunjukkan, bahwa Kota Bandung jauh melampaui kota-kota lainnya. Beragamnya sektor usaha yang berada di Kota Bandung menandakan bahwa kota ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para pelaku UMKM.

Tabel 1.5 Jumlah UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung

Tahun	Sektor Kuliner
2016	1.707
2017	79
2018	281
2019	201

2020	136
2021	831
2022	355
2023	558
2024	670
TOTAL	4.818

Sumber: Diskopukm (2024)

Menurut data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, jumlah usaha mikro saat ini yaitu 10.690 unit, usaha kecil sebanyak 465 unit, dan usaha menengah sebanyak 17 unit. Meskipun jumlah UMKM yang berada di Kota Bandung terbilang besar, data ini mencerminkan variasi skala usaha yang berbeda, dengan didominasi oleh pelaku usaha mikro sektor kuliner sebanyak 4.818 unit usaha. Pada Tabel 1.5 terlihat jumlah UMKM di sektor kuliner mengalami fluktuasi setiap tahunnya, disebabkan oleh ketidakmampuan UMKM untuk dapat bertahan lama dalam jangka waktu panjang, yang berujung pada kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan dalam perencanaan keuangan, yang mana proses perencanaan keuangan di sektor kuliner lebih rumit dibandingkan sektor usaha lainnya, seperti jasa atau *fashion*. Adanya fenomena ini, menjadikan sektor kuliner penting untuk diteliti lebih dalam karena kerumitan perencanaannya.

Tabel 1.6 Hasil Pra Survei Variabel Perencanaan Keuangan Pribadi

No	Pernyataan	Persentase	
		Iya	Tidak
1	Saya memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan saya dapat dikelola secara teratur.	43% (13 orang)	57% (17 orang)
2	Saya selalu menyusun anggaran secara rinci setiap bulan untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana untuk dana darurat atau investasi.	27% (8 orang)	73% (22 orang)

3	Saya memanfaatkan berbagai aplikasi keuangan digital untuk membantu saya mengelola keuangan pribadi dan usaha.	20% (6 orang)	80% (24 orang)
---	--	------------------	-------------------

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Peneliti melakukan pra survei mengenai perencanaan keuangan pribadi dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Berdasarkan data pada tabel 1.6, perencanaan keuangan pribadi pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung masih terbilang rendah. Sebanyak 57% pelaku UMKM belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya, menggambarkan kurangnya pemahaman dalam menjaga kesehatan finansial baik secara pribadi maupun bisnis. Selain itu, 73% pelaku UMKM tidak menyusun anggaran secara rinci setiap bulan untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana untuk dana darurat atau investasi. Yang artinya, tanpa anggaran keuangan yang terstruktur maka pelaku UMKM akan lebih rentan mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas yang dapat berdampak pada ketidakstabilan usaha mereka. Dalam hal pemanfaatan aplikasi keuangan digital, sebanyak 80% pelaku UMKM yang belum menggunakannya. Menandakan bahwa mayoritas pelaku UMKM kurang memanfaatkan teknologi yang tersedia, sehingga dapat menghambat efektivitas dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Adanya data ini, menunjukkan bahwa pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung masih membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai perencanaan keuangan pribadi.

Temuan ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang UKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Bapak Frans, yang mengatakan bahwa pertumbuhan UMKM mengalami penurunan. Salah satu penyebab utama adalah banyaknya pelaku usaha yang kurang memahami dalam mengelola keuangan dengan baik. Berdasarkan hasil pembinaan dan program sosialisasi yang dilakukan oleh Diskopukm Kota Bandung, ditemukan bahwa lebih dari 50% pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak memiliki pencatatan keuangan yang layak, baik dalam bentuk pembukuan sederhana maupun terperinci dikarenakan kurangnya literasi keuangan yang berdampak pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara optimal. Literasi

keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha, karena jika tidak dapat mengelola keuangan dengan tepat maka usaha yang sedang dijalankan berpotensi mengalami kendala, bahkan dapat berakhir dengan kerugian (Rahma Nur Hamida, 2023).

Tabel 1.7 Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Indeks	Hasil Survei	
	2022	2024
Literasi	49,68%	65,43%
Inklusi	85,10%	75,02%

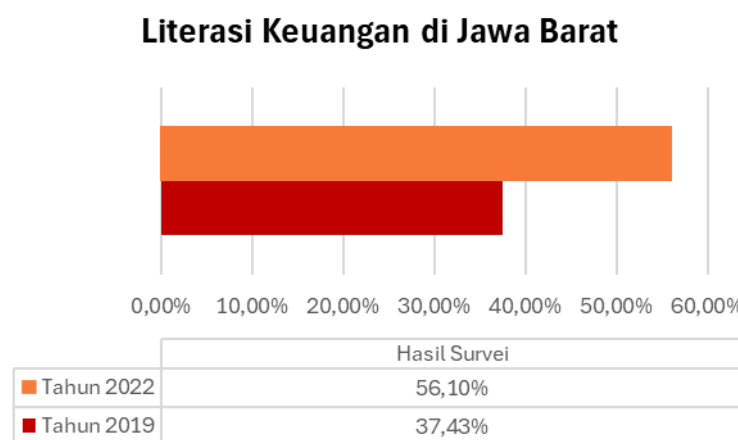
Sumber: OJK (2024)

Berbanding terbalik dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43% meningkat signifikan dari angka 49,68% pada tahun 2022, sedangkan pada inklusi keuangan di tahun 2024 sebesar 75,02% menurun dari angka 85,10% pada tahun 2022 (OJK, 2024). Penurunan inklusi keuangan ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan setelah memahami risikonya. Selain itu, faktor ekonomi seperti kenaikan harga atau aturan baru yang lebih ketat dapat membuat akses ke layanan keuangan menjadi lebih sulit (Carrisa, 2023).

Meskipun secara nasional literasi keuangan mengalami peningkatan, tetapi terdapat perbedaan yang terlihat jelas di kalangan pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro. Pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan, bahwa tingkat literasi keuangan UMKM hanya sebesar 14,44%. Rendahnya angka ini menggambarkan kurangnya pemahaman pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner yang memiliki alur pengelolaan keuangan yang lebih kompleks (OJK, 2022).

Pada Gambar 1.3 hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Jawa Barat tercatat sebesar 37,43%. Sedangkan, pada tahun 2022 indeks literasi keuangannya mengalami peningkatan yang positif sebesar 56,10%. Meskipun ada kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat literasi keuangan di Jawa

Barat masih di bawah rata-rata nasional. Begitupun dengan hasil temuan Harianti et al., (2021) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan UMKM di Kota Bandung hanya sebesar 58,91% tergolong rendah. Adanya fenomena ini, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM di Jawa Barat khususnya Kota Bandung, yaitu kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Hal ini menjadikan pentingnya sosialisasi literasi keuangan yang lebih mendalam untuk membantu para pelaku UMKM di Kota Bandung dalam meningkatkan pengelolaan keuangan.



Gambar 1.3 Literasi Keuangan di Jawa Barat

Sumber: OJK (2022)

Peneliti melakukan pra survei mengenai literasi keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi terkini literasi keuangan dan perencanaan keuangan pribadi di kalangan UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari pra survei mengenai literasi keuangan yang telah disebarkan:

Tabel 1.8 Hasil Pra Survei Variabel Literasi Keuangan

No	Pernyataan	Persentase	
		Iya	Tidak
1	Saya memiliki pemahaman tentang lembaga jasa keuangan dan berbagai produk yang ditawarkan, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan investasi beserta manfaat dan risikonya.	47% (14 orang)	53% (16 orang)

2	Saya mampu membandingkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis saya, dan membuat keputusan keuangan yang tepat.	43% (13 orang)	57% (17 orang)
3	Saya mengikuti perkembangan informasi mengenai literasi keuangan melalui berbagai sumber.	20% (6 orang)	80% (24 orang)

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Data pada tabel 1.8 menunjukkan bahwa literasi keuangan pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung masih terbilang rendah. Pada pernyataan mengenai pemahaman tentang lembaga jasa keuangan dan berbagai produk yang ditawarkan, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan investasi beserta manfaat dan risikonya terdapat sebanyak 53% yang tidak paham mengenai hal ini. Kemudian, pada pernyataan mengenai mampu membandingkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis saya, dan membuat keputusan keuangan yang tepat, sebanyak 57% yang tidak mampu membandingkan dan membuat keputusan yang tepat, dikarenakan kurangnya pemahaman sebelumnya. Sementara itu, sebanyak 80% yang tidak *update* mengenai informasi literasi keuangan, menggambarkan bahwa mayoritas pelaku UMKM kurang tanggap dalam mencari dan memanfaatkan informasi yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai literasi keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muhammad Noor Fuadi dan Sri Trinaningsih, ditemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh secara parsial terhadap perencanaan keuangan pribadi (Fuadi & Trisaningsih, 2022). Hasil temuan ini selaras dengan penelitian Wijayanti & Kartawinata (2023) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan pribadi mahasiswa di Jawa Timur. Begitu pun dengan hasil temuan Sari & Yanti (2023) yang menyatakan bahwa

literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan pribadi mahasiswa S1 yang sudah berpenghasilan di Jakarta.

Keunikan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada mahasiswa. Pelaku UMKM terutama pada sektor kuliner memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyusun perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi untuk mengetahui bagaimana literasi keuangan dapat membantu untuk keberlanjutan usaha. Penelitian ini didukung oleh temuan Nony Kezia Marchyta (2023) yang menekankan pentingnya perencanaan keuangan bagi pelaku usaha untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yosephin Gepi Ully, ditemukan bahwa literasi keuangan dan perencanaan keuangan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Adanya temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perencanaan keuangan adalah aspek yang sangat penting untuk dipahami secara mendalam agar kedepannya pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih baik (Ully, 2023).

Berdasarkan uraian fenomena, data, dan permasalahan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Pribadi Bagi Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung masih memiliki kendala dalam memahami dan menerapkan literasi keuangan. Rendahnya tingkat pemahaman mengenai literasi keuangan ini, dapat menghambat pelaku UMKM dalam menyusun perencanaan keuangan pribadi yang efektif dan mengambil keputusan keuangan

yang tepat. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi keuangan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
2. Bagaimana perencanaan keuangan pribadi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan pribadi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui literasi keuangan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui perencanaan keuangan pribadi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan pribadi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai literasi keuangan dan perencanaan keuangan pribadi, khususnya UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur akademik yang berkaitan dengan literasi keuangan dan perencanaan keuangan pribadi untuk digunakan sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam literasi keuangan agar mampu membuat perencanaan keuangan yang lebih baik dan terstruktur, sehingga dapat meminimalisir risiko pada usahanya. Dengan keterampilan yang lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kebijakan dan program yang lebih tepat, khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan dan perencanaan keuangan pribadi pelaku UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, maka pada penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan secara umum yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat penjelasan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan literasi keuangan dan perencanaan keuangan pribadi UMKM sektor kuliner yang menjadi dasar pedoman penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Memuat penjelasan mengenai metode dan teknik penelitian yang akan dilakukan, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi serta sampel, pengumpulan data, dan teknis analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi objek yang diteliti dan bagi peneliti selanjutnya.